

ABSTRAK

Judul tesis : “Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Penulis akan membahas dalam rumusan masalah: 1). Bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?; 2). Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan bagaimana solusinya? Tujuan penelitian ini: Untuk menganalisis: Pengelolaan Zakat Di Indonesia, kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23/2011.

Pendekatan penelitian: metode pendekatan yuridis sosiologis, bersifat *preskriptif analisis* dan *deskriptif analisis*. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari data primer dan data skunder. Analisa Data secara kualitatif.

Pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Untuk membantu BAZNAS, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: *Kendala Internal*, bahwa Pengelolaan oleh negara yang tidak memadai; BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri tetapi bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama; Fase rekrutmen BAZNAS menjadi persoalan yang sangat krusial; Kurangnya sosialisasi tentang zakat; tidak adanya sanksi yang tegas; Model pendistribusian zakat tidak tepat sasaran; LAZ hanya boleh membuka satu kantor perwakilan di tingkat Provinsi. 2. *Kendala Eksternal*, bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat; Kurangnya minat masyarakat; Kurangnya peran serta ulama; mayoritas masyarakat masih belum mengenal Baznas; belum ada Perda penyaluran zakat ke BAZNAS. Solusi untuk Kendala Internal, yaitu: Pengelolaan oleh negara yang memadai, BAZNAS tidak bertanggungjawab kepada Presiden; Fase rekrutmen BAZNAS yang transparan; memaksimalkan sosialisasi, pengelola zakat harus orang-orang yang benar-benar kompeten; sanksi yang tegas; model pendistribusian zakat tepat sasaran; LAZ membuka perwakilan di Kota/ Kabupaten. Solusi untuk Kendala Eksternal: memaksimalkan sosialisasi, melibatkan peran serta ulama; diterbitkan Perda yang mengatur Pengelolaan Zakat.

Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat, BAZ dan LAZ, Kemaslahatan Umat.*

ABSTRACT

The title of the thesis: "Management of Zakat in Indonesia Based on Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat". The author will discuss in the formulation of the problem: 1). How is the management of zakat in Indonesia based on Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat?; 2). What are the obstacles faced in the management of zakat in Indonesia based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and what are the solutions? 23/2011.

Research approach: socio legal research approach method, prescriptive analysis and descriptive analysis. Data collection techniques by conducting library research from primary data and secondary data. Data analysis qualitatively.

Zakat management in Indonesia is based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, that in an effort to achieve the goal of zakat management, BAZNAS, provincial BAZNAS, and district/city BAZNAS are formed. BAZNAS is a non-structural government institution that is independent and responsible to the President through the Minister. To help BAZNAS, the community can form LAZ. The establishment of LAZ must obtain permission from the Minister or an official appointed by the Minister.

Obstacles faced in the management of zakat in Indonesia based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, namely: Internal constraints, that management by the state is inadequate; BAZNAS is a non-structural government institution that is independent but responsible to the President through the Minister of Religion; The recruitment phase of BAZNAS becomes a very crucial issue; Lack of socialization about zakat; the absence of strict sanctions; The zakat distribution model is not right on target; LAZ may only open one representative office at the Provincial level. 2. External Constraints, that the people's knowledge is low; Lack of public interest; Lack of participation of ulama; the majority of people still do not know Baznas; there is no regional regulation on the distribution of zakat to BAZNAS. Solutions for Internal Constraints, namely: Adequate management by the state, BAZNAS is not responsible to the President; Transparent BAZNAS recruitment phase; maximizing socialization, zakat managers must be people who are truly competent; strict sanctions; the zakat distribution model is right on target; LAZ opens representatives in the City/Regency. Solutions for External Constraints: maximizing socialization, involving the participation of ulama; issued a regional regulation that regulates the management of zakat.

Keywords: Management of Zakat, BAZ and LAZ, Benefit of the Ummah